



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK &
PENGANUGERAHAAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
TAHUN 2021

JAKARTA, 26 OKTOBER 2021

Assalamualaikum wr.wb

Selamat siang dan salam sejahtera

Yang terhormat,

1. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. K.H.Ma'ruf Amin
2. Yang Kami Hormati Pimpinan Komisi 1 DPR RI
3. Yang Kami Hormati Bapak/Ibu Menteri/Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur se-Indonesia, Pimpinan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Lembaga Non Struktural, Rektor Perguruan Tinggi Negeri, * Pimpinan BUMN, Pimpinan Partai Politik, Komisioner Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik, Kelompok Masyarakat Sipil, seluruh undangan, dan Yang Saya Banggakan Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan YME atas segala rahmat dan Perkenan-Nya kita dapat hadir disini dalam keadaan sehat di acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021.

Bapak Wakil Presiden dan seluruh undangan yang saya muliakan,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijin saya selaku Ketua Komisi Informasi Pusat bersama Komisioner Komisi Informasi Pusat, menghaturkan terimakasih kepada Bapak K.H. Ma'ruf Amin, karena pada tahun ini Bapak Wakil Presiden RI kembali berkenan menyerahkan secara langsung Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Presiden RI dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di tanah air.

Bagi kami, pentingnya penganugerahan monitoring evaluasi langsung oleh Bapak Wakil Presiden adalah, Pertama, secara regulasi diatur dalam UU 14 Tahun 2008, Komisi Informasi bertanggungjawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada dewan Perwakilan Rakyat RI. Kedua, sesuai dengan visi Misi Pemerintah, yaitu Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan gotong royong. Ketiga, termotivasinya badan publik badan public, dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Bapak Wakil Presiden dan para undangan yang terhormat,

Kami sampaikan juga, bahwa pada tahun 2021 Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan salah satu program prioritas nasional yakni penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), adapun nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Nasional 2021 diperoleh sebesar 71,37 menunjukkan hasil

pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di tanah air berada pada kondisi sedang. Nilai IKIP Nasional merupakan hasil analisis dari penilaian 312 Informan Ahli 34 Provinsi yang memberikan indeks 72,60 dan hasil penilaian 17 Informan Ahli Nasional yang memberikan indeks 68,54, penilaian IKIP Nasional di 2021 merupakan gambaran pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik selama tahun 2020 dari bulan Januari hingga Desember 2020, bahwa, dengan adanya nilai IKIP 2020 dapat memudahkan bagi stakeholder dalam mengevaluasi pelaksanaan UU KIP yang telah dijalankan oleh Badan Publik maupun masyarakat pengguna Informasi Publik. nilai IKIP 2020 ini dapat menjadi catatan dan Rekam Jejak dalam proses pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia, serta mengetahui dan memahami terhadap tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan UU KIP itu sendiri.

Bapak Wakil Presiden dan para undangan yang terhormat,

Bahwa sejak 10 tahun berdiri, Komisi Informasi belum memiliki indeks yang dapat memotret secara keseluruhan tentang pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Untuk monitoring dan evaluasi (monev) kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP telah dilaksanakan sejak tahun 2011 dan hasil monev tersebut dijadikan data awal untuk melengkapi penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Serta Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 merupakan hal pertama bagi Komisi Informasi Pusat. Perlu kami sampaikan bahwa Monev dan IKIP berbeda secara metodologi.

*

Bapak Wakil Presiden dan para undangan yang terhormat,

Bahwa pada Tahun 2021, kami melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Badan Publik yang berjumlah 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh), hal ini mengalami penurunan jumlah badan Badan Publik pada tahun 2020 berjumlah 348 Badan Publik, hal dikarenakan adanya pembubaran atau penggabungan kelembagaan antara beberapa BUMN yang tahun 2020 terdapat 107 BP menjadi 101 BP pada tahun 2021, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non

Kementerian tahun 2020 terdapat 45 BP menjadi 41 BP pada tahun 2021, serta Lembaga Non Struktural tahun 2020 terdapat 34 menjadi 33 BP pada tahun 2021.

Bapak Wakil Presiden dan para undangan yang terhormat, Sesuai Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 10/KEP/KIP/X/2021, Adapun hasil dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 secara total adalah sebagai berikut:

No	Kualifikasi Badan Publik	Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif
1	Perguruan Tinggi Negeri	21 BP (24,71 %)	15 BP (17,65%)	13 BP (15,29%)	12 BP (14,12%)	24 BP (28,24%)
2	Badan Usaha Milik Negara	6 BP (5,94%)	15 BP (14,85%)	17 BP (16,83%)	16 BP (15,84%)	47 BP (46,53%)
3	Lembaga Non Struktural	2 BP (6,06 %)	7 BP (21,21%)	5 BP (15,15%)	3 BP (9,09%)	16 BP (48,48%)
4	Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian	16 BP (39,02 %)	6 BP (14,63 %)	4 BP (9,76%)	6 BP (14,63%)	9 BP (21,95%)
5	Pemerintah Provinsi	10 BP (29,41%)	11 BP (32,35%)	10 BP (29,41%)	0 BP (0%)	3 BP (8,82%)
6	Kementerian	24 BP (70,59%)	7 BP (20,59%)	2 BP (5,88%)	0 BP (0%)	1 BP (2,94%)
7	Partai Politik	4 BP (44,44%)	2 BP (22,22%)	3 BP (33,33%)	0 BP (0%)	0 BP (0%)
TOTAL 337 BP		83 BP	63 BP	54 BP	37 BP	100 BP
PROSENTASE		24,63 %	18,69 %	16,02 %	10,98%	29,67 %

Melihat dari prosentase tersebut, secara garis besar, harus digarisbawahi bahwa Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia mengalami perubahan mengarah kearah perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi public sebagaimana dari tujuan yang diamanatkan UU KIP, karena terdapat kenaikan jumlah Badan Publik informatif dan menuju informative serta penurunan jumlah badan public cukup informatif, tidak informative dan kurang informatif dari tahun 2020 antara lain, sebagai berikut:

Jumlah Badan Publik tahun 2020	Jumlah Badan Publik tahun 2021	Informatif		Menuju Informatif		Cukup Informatif		Kurang Informatif		Tidak Informatif	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
348 BP	338 BP	60 BP	83 BP	34 BP	63 BP	61 BP	54 BP	47 BP	37 BP	146 BP	100 BP

Dengan capaian ini Komisi Informasi Pusat tidak berpuas diri, kami harus terus menekankan menjadikan keterbukaan informasi sebagai suatu budaya kita bersama, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien. Lebih dari itu, hal ini juga kami sadari , bahwa Komisi Informasi, harus lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik, yang harus didukung juga oleh komitmen dari pemerintah.

Dari data prosentasi diatas, dapat terlihat dengan jelas pada tahun ini, badan publik yang selalu berada pada kualifikasi informative (empat tahun berturut-turut) dan adanya badan publik yang secara sungguh-sungguh berbenah diri, sehingga masuk kualifikasi informative patut diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, meski kami juga memahami, adanya badan publik yang turun dari kualifikasi informatif. Tetapi, dengan masih adanya Badan Publik masih pada posisi tidak informatif dan kurang informatif, Komisi

Informasi Pusat akan terus berupaya mendorong untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi public hingga berada pada kualifikasi informatif.

Pada kesempatan ini juga kami tekankan, bahwa hasil penganugerahan ini, bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antar badan Publik, tetapi harus kita maknai sebagai tolok ukur implementasi keterbukaan informasi publik di tanah air yang kata kuncinya adalah pada kualifikasi, bukan peringkat dan nilai suatu Badan Publik. Dan yang utama adalah Komisi Informasi Pusat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bapak Wakil Presiden, dan para hadirin yang terhormat,

Sebagai penutup dari laporan, sekali lagi kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh pimpinan badan publik yang telah berpartisipasi dan berkomitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Semoga kedepannya, pelaksanaan Keterbukaan Informasi Pubik menjadi lebih berkualitas dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

Terakhir, Kami Haturkan terimakasih, kepada semua pihak pihak, yang telah bekerja dari awal hingga akhir, demi suksesnya agenda Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 ini. Dan Kami Mohon maaf jika terdapat kekurangan kekurangan. Mohon Maaf yang sebesar-besarnya.

Demikian Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 ini kami sampaikan dan kami mohon kepada Wakil Presiden RI, Bapak K.H. Ma'ruf Amin berkenan untuk memberikan Penganugerahan kepada Badan Publik dengan kualifikasi informatif atas komitmennya dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Ketua,

Komisi Informasi Pusat

Gede Narayana

* Komisi Informasi Pusat *